

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 TERHADAP PEMBERITAAN PROFESI PERS YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Putusan NOMOR 854 K/PID/2015 Tanggal 28 Oktober 2015)

Skripsi

Oleh:

Rehan Renaldy

201510115038



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Terhadap Pemberitaan Profesi Pers Yang Melakukan
Tindak Pidana (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 854 K/PID/2015 Tanggal
28 Oktober 2015)

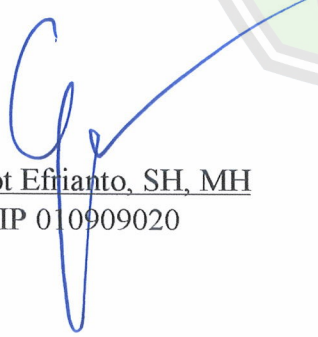
Nama Mahasiswa : Rehan Renaldy
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115038
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Ujian : 29 Juli 2019

Jakarta, 06 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gatot Efrianto, SH, MH
NIP 010909020


Ahmad Baihaki, SHI, MH
NIP 11108023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Pemberitaan Profesi Pers Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/PID/2015 Tanggal 28 Oktober 2015)

Nama Mahasiswa : Rehan Renaldy

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115038

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 29-07-2019

Bekasi, 06 Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H
NIP 10403011

Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H
NIP 11703061

Penguji II : Ahmad Baihaki, SHI., M.H
NIP 11108023

MENGETAHUI

Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag.
NIP 1901377

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TERHADAP
PEMBERITAAN PROFESI PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”
(Studi Kasus Putusan Nomor 854 K/PID/2015 Tanggal 28 Oktober 2015)

Ini adalah benar – benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 29 juli 2019

Yang membuat Pernyataan,



Rehan Renaldy
201510115038

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rehan Renaldy
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115038
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PELAKSANAAN UNDANG-UDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TERHADAP
PEMBERITAAN PROFESI PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.
(Studi Kasus Putusan Nomor 854 K/PID/2015 Tanggal 28 Oktober 2015)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Juli 2019

yatakan,

(Rehan Renaldy)
201510115038

ABSTRAK

Rehan Renaldy, 201510115038, Skripsi “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Pemberitaan Profesi Pers Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/PID/2015 tanggal 28 Oktober 2015)”

Eksistensi pers menjadi salah satu indikator penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi. Salah satu pilar terpenting dari prinsip negara hukum demokratis adalah kebebasan pers. Kebebasan pers dapat berjalan tergantung politik hukum suatu rezim dan sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi menunjukkan perbedaan dinamika kebebasan pers di dalam sistem hukum di Indonesia. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis. Kebebasan Pers merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan karena pers salah satu bagian penting didalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Namun, dengan melihat perilaku masyarakat saat ini, fungsi dari pers itu sendiri masih sering disalahgunakan didalam memenuhi keinginan-keinginan pribadi dari tiap individu-individu tertentu yang ada didalam masyarakat tersebut. Perbuatan penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan subjek pers selama berhubungan dengan masalah ketersimpangan fungsi pers, dapat digolongkan menjadi tindak pidana-pers. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pertanggung jawaban tindak pidana delik pers dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/PID/2015. Untuk meneliti permasalahan yang penulis ambil menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada kepustakaan dan menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa selama ini sudah dikenal dua sistem pertanggungjawaban pidana pers yang menonjol, masing-masing menurut sistem *deelneming* atau penyertaan dan sistem *waterfall* atau air terjun. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dalam tindak pidana pers, maka yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam perundang-undangan saat ini yaitu KUHP dan Undang-undang 40 tahun 1999. Kesimpulannya undang-undang nomor 40 tahun 1999 masih dikesampingkan dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dunia pers dan majelis hakim lebih cenderung menggunakan KUHP.

Kata Kunci : Pers, Pertanggungjawaban Pidana, Delik Pers .

Pembimbing

Dr. Gatot Efrianto, SH.,MH

Ahmad Baihaki, SHI, M.H

ABSTRACT

Rehan Renaldy, 201510115038 Skripsi"Implementation of Law Number 40 of 1999 concerning Press Professionals Conducting Crimes (Case Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 854 K / PID / 2015 dated 28 October 2015)"

The existence of the press is one indicator of the administration of the rule of law and democracy. One of the most important pillars of the principle of the state of democratic law is freedom of the press. The freedom of the press can run depending on the legal politics of a regime and since the Old Order, the New Order, and the Reformation Order showed differences in the dynamics of press freedom in the legal system in Indonesia. A free and responsible press plays an important role in a democratic society. Press Freedom is an important element in the formation of a democratic, open and transparent state system because the press is an important part of the survival of society. However, by looking at current community behavior, the function of the press itself is still often misused in fulfilling the personal desires of each particular individual within the community. Acts of misuse or irregularities committed by the subject of the press as long as they are related to problems in the deviation of press functions, can be classified as criminal acts-the press. This study was made to determine the accountability of criminal offenses in the press offenses of the Supreme Court Number 854 K / PID / 2015. To examine the problems that the authors take using normative juridical research methods, namely research that is based on literature and uses the method of approach to the law by referring to the applicable legal rules and their application. Based on the results of the study, the authors do that so far there have been known two prominent systems of criminal liability press, each according to the system of derelicting or inclusion and the waterfall or waterfall system. Speaking of criminal responsibility in the criminal acts of the press, what is meant is criminal liability that applies in the current legislation, namely the Criminal Code and Law 40 of 1999. In conclusion, law number 40 of 1999 is still ruled out in deciding cases. criminal offenses committed by press actors and judges are more likely to use the Criminal Code.

Keywords: Press, Criminal Accountability, Press offense.

adviser

Dr. Gatot Efrianto, SH.,MH

Ahmad Baihaki, SHI, M.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **"Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Pemberitaan Profesi Pers Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/PID/2015 tanggal 28 Oktober 2015)"**

Skripsi dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulisan skripsi ini tentunya tidak bisa Penulis selesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs, Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A. Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Gatot Efrianto, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H Selaku Dosen Pembimbing teknis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai kaidah – kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, Achmad Firmanandi dan Ela Nurmala, terima kasih atas pengorbanan tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Terima kasih untuk Rendy Ferdiansyah dan Indah Pratiwi yang selalu mendukung dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini
9. Untuk kekasih tersayang yang sangat mendukung saya Ainnun Putri Adilah yang memberikan support dalam menuliskan skripsi ini.

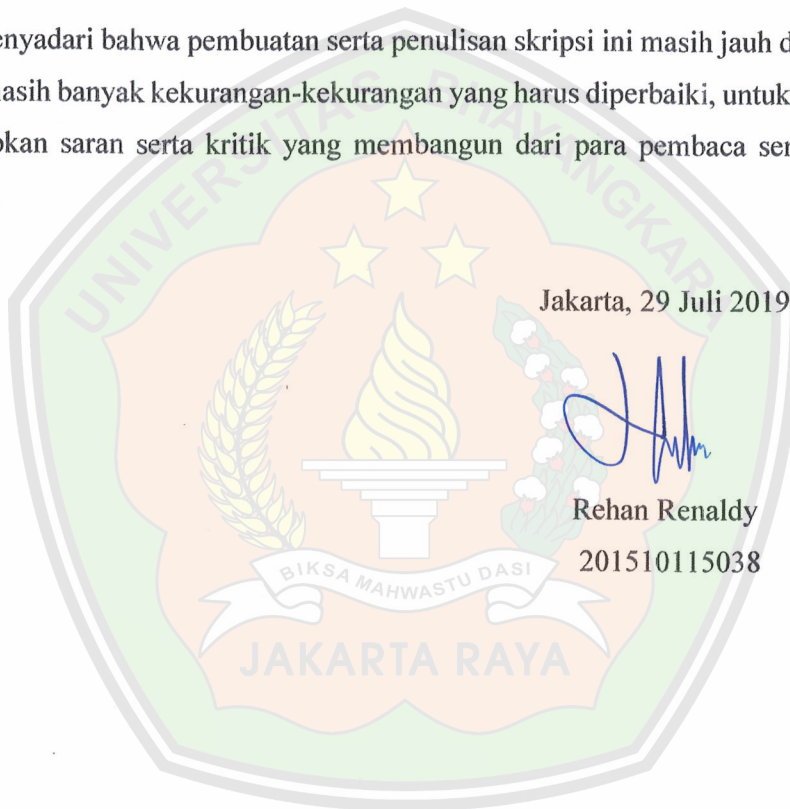
10. Untuk kerabat Septa Sura Eka Putra Adi S.H., M.H yang sangat membantu dalam memberikan masukan dan semangat dalam skripsi ini.
11. Sdr, Rizky Nur Adrianto selaku teman sejawat penulis yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Join Kopi Bulungan yang telah membantu memberi masukan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih juga untuk Nasrullah dan Yovita Dewi Wijayanti yang selalu mengingatkan dan memberi semangat selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikannya

Penulis menyadari bahwa pembuatan serta penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan/atau masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu Penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari para pembaca serta pemerhati dari skripsi ini.

Jakarta, 29 Juli 2019



Rehan Renaldy
201510115038



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPS	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Teori dan Konsep	10
1.5 Metode Penelitian	19
1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum	24
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pers	28
2.3 Pengaturan Tindak Pidana Pers di Indonesia	32
2.4 Kebebasan Pers	43
2.5 Peran Serta Masyarakat Terhadap Pers	45
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1 Duduk Perkara Tindak Pidana Pers	46
3.2 Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan	47
3.4 Putusan Majelis Hakim dan Pertimbangan Hakim	52
3.5 Menyatakan Putusan Tidak Mempertimbangkan Beberapa Hal	52
BAB IV PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN	
4.1 Konsep Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers	54
4.2 Delik Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999	71
BAB V PENUTUP	

1 Kesimpulan	79
2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT PENULIS



DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG SINGKATAN	ARTI SINGKATAN
HAM	HAK ASASI MANUSIA
KUHAP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
KUHP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
MA	MAHKAMAH AGUNG
MKS	MAKASSAR
P3	PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN
PEMRED	PEMIMPIN REDAKSI
PID	PIDANA
PLP	PALOPO
PN	PENGADILAN NEGERI
PT	PENGADILAN TINGGI
SPS	STANDAR PROGRAM SIARAN
UU	UNDANG-UNDANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : (Putusan Mahkamah Agung)

Lampiran 2 : (Lembar Konsultasi)

Lampiran 3 : (Riwayat Hidup)

